

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN		
	1.1	Latar Belakang .....	I-1
	1.2	Landasan Hukum .....	I-2
	1.3	Maksud dan Tujuan .....	I-4
	1.4	Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-1
	2.2	Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-5
	2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-8
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-25
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	III-1

	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta .....	III-7
	3.3	Telaahan Renstra Kemendagri .....	III-14
	3.4	Telaahan RTRW dan KLHS .....	III-21
	3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-26
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	IV-1
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	V-1
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	VI-1
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	VII-1
BAB VIII		PENUTUP .....	VIII-1

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

#### A. Pengertian Renstra

Menurut Kerzner Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Rencana strategis ini dalam pemerintahan lebih dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Daerah. Ada 3 jenis rencana pembangunan daerah yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RPJMD dan RKD ini yang kemudian menjadi dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis atau Renstra, Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi program. Dengan kata lain, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017–2022 untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 – 2025 yaitu mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

## B. Fungsi Renstra

Sebagai suatu dokumen perencanaan, maka Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta berfungsi untuk memberikan panduan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun (tahun 2017-2022) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu strategis dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

## C. Proses Penyusunan Renstra

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Yogyakarta, maka penyusunan sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih sesuai dengan tupoksi dan isu strategis yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

## D. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya

Hubungan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tahun 2017– 2022 dengan dokumen lainnya adalah :

1. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Propinsi DIY, RPJPD Kota Yogyakarta, RTRW Kota Yogyakarta, dan RKPD Kota Yogyakarta
2. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran SKPD

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
- o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
- p. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

#### A. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

#### B. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tahun 2017 - 2022 adalah untuk :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;

2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang memuat program dan kegiatan.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

##### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta
- 3.3 Telaahan Renstra Kemendagri
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

##### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



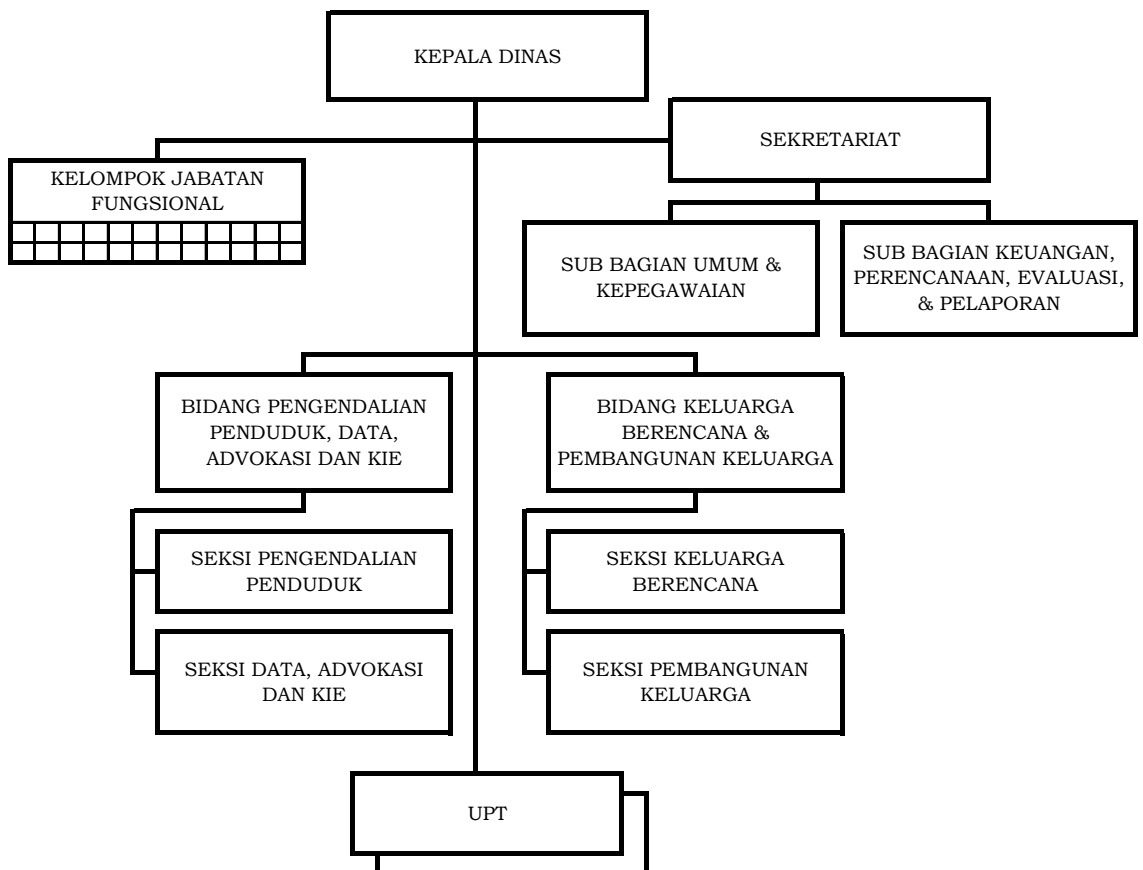
BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

B. Struktur Organisasi



### C. Uraian Tugas dan Fungsi

Dalam Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 20 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan disebutkan bahwa strategi pelaksanaan grand design pembangunan kependudukan dilakukan melalui:

- **pengendalian kuantitas penduduk;**
- peningkatan kualitas penduduk;
- pembangunan keluarga;
- penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- penataan administrasi kependudukan.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengendalian kuantitas penduduk dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program Keluarga Berencana melalui pendewasaan usia perkawinan; pengaturan kehamilan yang diinginkan; pembinaan kesertaan keluarga berencana; peningkatan kesejahteraan keluarga; penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan; peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan peningkatan pendidikan dan peran wanita. Sedangkan penurunan mortalitas dilakukan melalui penurunan angka kematian ibu hamil; penurunan angka kematian ibu melahirkan; penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan penurunan angka kematian bayi dan anak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 jo. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sedangkan rincian tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. menyusun konsep kebijakan Walikota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
2. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
3. mengendalikan dan merumuskan segala bentuk pelaporan dalam bidang tugasnya;
4. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis,
5. perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja dinas;
6. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang di lingkup Dinas;
7. mengkoordinasikan penyusunan strategi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. membina pelaksanaan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

10. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. melaksanakan pembinaan operasional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kinerja Dinas;
12. mengevaluasi permasalahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk dicarikan pemecahannya baik secara lintas program maupun lintas sektoral dalam rangka peningkatan pelayanan;
13. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
14. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas;
15. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing unit yang ada di lingkungan Dinas;
16. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada para bawahan;
17. menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;
18. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
19. melaksanakan pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
20. mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan laporan kepada Walikota tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai bahan evaluasi dan informasi secara berkala kepada Walikota;
21. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
22. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Potensi yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a) Cakupan pelayanan berdasarkan data Desember 2016 :

- Jumlah PUS : 44.454 pasangan
- Partisipasi KB : 73,57 %
- *Un Met Need* : 11,40 %

b) Jangkauan Pelaksanaan Program, semua wilayah se Kota Yogyakarta merupakan obyek pelaksanaan program Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, terdiri dari:

- Kecamatan : 14
- PPKBD : 45
- Sub PPKBD : 617
- Kelompok kegiatan BKB : 249
- Kelompok kegiatan BKR : 80
- Kelompok kegiatan BKL : 106
- Kelompok kegiatan UPPKS : 226
- Kelompok kegiatan PIK R: 42

c) Program dan kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta meliputi :

1. Program Pengendalian Penduduk, Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Program "Pengendalian Penduduk, Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi" terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu : Kegiatan Pengendalian Penduduk dan Kegiatan Pengelolaan Data, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

2. Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Program "Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga" terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu : Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kegiatan Pembangunan Keluarga.

d) Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

1. Kepegawaian :

Jumlah personil yang ada per Juni 2017 sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang PNS, dengan rincian sebagai berikut :

Data Kepegawaian  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan  
Per Juni 2017

No	Kategori	Pendidikan					Golongan/Ruang						
		SMP	SMA	D3	S1	S2	II/c	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b
1.	Eselon IIb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Eselon III a	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Eselon IIIb	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
4.	Eselon IV a	-	-	-	6	-	-	-	1	1	4	-	-
5.	Fungsional Umum	-	7	-	2	-	3	-	5	1	-	-	-
6.	Fungsional PKB	-	6	2	12	-	-	1	-	2	6	8	3
7.	Fungsional PKB Titipan	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	Jumlah	-	13	2	23	1	3	1	7	4	11	9	4
		39					39						

Untuk membantu ketugasan PNS di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibantu oleh 2 (dua) orang PTT/Naban, 1 (satu) orang tenaga PNS titipan dan 20 (dua puluh) orang Tenaga Teknis, dengan rincian sebagai berikut :

Data Kepegawaian  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Per Juni 2017

No.	Kategori	Pendidikan				
		SMP	SMA	D3	S1	S2
1.	PTT/Naban	-	2	-	-	-
2.	Tenaga Teknis	-	-	2	18	-
	Jumlah	-	2	2	18	-

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja :

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta menempati gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Depokan KG II/ 242 Kota Yogyakarta dengan luas bangunan 600 m<sup>2</sup> dan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada :

- |                    |           |                   |          |
|--------------------|-----------|-------------------|----------|
| • Kendaraan roda 4 | : 4 buah  | • Rak besi siku   | : 6 buah |
| • Kendaraan roda 2 | : 37 buah | • Rak kayu        | : 1 buah |
| • Sepeda           | : 1 buah  | • Filling cabinet | : 6 buah |

• Termometer suhu	: 1 buah	• CCTV	: 1 buah
• Mesin ketik	: 6 buah	• Brankas	: 1 buah
• Lemari Display	: 1 buah	• Almari kayu	: 11 buah
• Almari besi 2 pintu	: 1 buah	• Almari kayu bupet	: 1 buah
• Almari locker rak	: 1 buah	• Almari Etalase	: 1 buah
• Almari locker	: 1 buah	• Almari Arsip Pintu Slip	: 4 buah
• Whiteboard 1 muka	: 1 buah	• Kursi Hadap Size	: 2 buah
• Whiteboard	: 6 buah	• Kursi Tamu	: 2 set
• Papan Pengumuman	: 1 buah	• Kursi susun/rapat	: 12 buah
• Mesin Presensi	: 2 buah	• Kursi Putar Sandaran rendah	: 2 buah
• Kursi Putar Tangan	: 4 buah	• Pigura Gambar Presiden	: 1 buah
• Kursi Kerja	: 26 buah	• Pigura Gmbr Wapres	: 1 buah
• AC	: 5 buah	• Tiang Bendera	: 1 buah
• Kursi Lipat	: 51 buah	• Dispenser	: 1 buah
• Kursi Kuliah Lipat	: 30 buah	• Kamera Video Digital	: 2 buah
• Meja Komputer	: 3 buah	• Komputer	: 28 buah
• Meja ½ Biro	: 37 buah	• Notebook	: 3 buah
• Jam Dinding	: 3 buah	• Notebook/tablet	: 1 buah
• Kulkas 1 pintu	: 1 buah	• Printer Laserjet	: 1 buah
• Kipas Angin Baling	: 2 buah	• Printer Dot Matrix	: 1 buah
• Kipas Angin Duduk	: 3 buah	• Printer Brother	: 20 buah
• Kompor Gas	: 1 buah	• Meja Kerja	: 17 buah
• Tabung Gas	: 2 buah	• Kursi Sandaran Rendah	: 1 buah
• Dipan	: 1 buah	• Kursi Biasa/staff	: 6 buah
• Tempat Cuci	: 1 buah	• Kamera Foto Digital	: 2 buah
• Televisi	: 1 buah	• LCD Proyektor	: 3 buah
• Wireless	: 17 buah	• Telepon	: 1 buah
• Mic Stand	: 2 buah	• Aipon	: 1 buah
• UPS	: 1 buah	• Mesin Faximile	: 1 buah
• Timbangan Injak	: 1 buah	• Obsgynbed	: 2 buah
• Kaca Hias/pigura	: 1 buah	• Gedung Kantor KB	: 1 buah
• Burung Garuda	: 1 buah	• Gudang Kontrasepsi	: 1 buah
• Kursi Putar Komputer	: 1 buah	• IUD Kit Sterilisator Non Listrik	: 2 buah
• Rak buku	: 2 buah	• Troli barang beroda	: 1 buah
• Mesin pompa air	: 2 buah	• Air purifier	: 1 buah
• Almari pakain	: 1 buah	• Almari besi rak kaca	: 15 buah
• Wall exhaustfan	: 5 buah	• Smartphone	: 23 buah
• Megaphone	: 1 buah	• Microphone	: 2 buah

- |                 |          |                     |          |
|-----------------|----------|---------------------|----------|
| • Modem         | : 2 buah | • Layar gantung     | : 1 buah |
| • Sound system  | : 1 buah | • Tiang mic berdiri | : 1 buah |
| • Tempat sampah | : 2 buah | • Meja 1 biro       | : 1 buah |

Kelengkapan sarana prasarana tersebut berupaya digunakan secara maksimal untuk menunjang kelancaran tugas baik di lingkungan kantor, maupun di masing-masing wilayah kerja Penyuluh KB. Namun demikian, beberapa kebutuhan sarana prasarana yang umur ekonomisnya terus berkurang, semisal printer dan komputer/laptop, harus terus diperhabarui, baik melalui pemeliharaan (service) maupun pembelian baru.

## 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### A. Capaian Kinerja Tahun 2012 – 2016

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2012 - 2016, menurut SPM, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah akan dijabarkan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Yogyakarta

No.	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target NSPK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun	0.35%	3.50%		0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%	0.07%	0.40%	0.16%	0.26%	0.27%	500.00%	87.50%	218.75%	134.62%	129.63%
2	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	74%	65%		72.36%	72.64%	72.93%	73.21%	73.50%	73.29%	74.34%	76.30%	75.34%	73.57%	101.29%	102.34%	104.62%	102.91%	100.10%
3	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	13%	5%		13.29%	13.33%	13.14%	13.07%	13.00%	12.09%	10.67%	9.25%	10.38%	11.40%	109.93%	124.93%	142.05%	125.92%	114.04%
4	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	85%	70%		83.32%	83.74%	84.16%	84.58%	85.00%	80.82%	82.14%	84.59%	86.19%	87.45%	97.00%	98.09%	100.51%	101.90%	102.88%
5	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	89%	87%		88.02%	88.14%	88.26%	88.38%	88.50%	86.52%	85.87%	86.18%	80.95%	86.51%	98.30%	97.42%	97.64%	91.59%	97.75%
6	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	100%	1 Petugas untuk 2 desa/ kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	111%	111%	102.22%	102.22%	97.78%	111.11%	111.11%	102.22%	102.22%	97.78%

No.	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target NSPK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
7	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	100%	1 Petugas di setiap desa/ kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	30% setiap tahun		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Terkendalnya/ menurunnya angka kelahiran	14 CBR			14,85 CBR	14,64 CBR	14,42 CBR	14,212 CBR	14 CBR	10,67 CBR	11,45 CBR	10,55 CBR	9,67 CBR	9,34 CBR	139%	128%	137%	147%	150%
11	Meningkatnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang mengikuti Program KB	73%			71.40%	71.80%	72.20%	72.60%	73.00%	68.87%	71.07%	72.22%	73.80%	75.78%	96.46%	98.98%	100.03%	101.65%	103.81%

## B. Evaluasi Kinerja Tahun 2012 – 2016

Dari tabel 2.1 dapat terlihat bahwa sampai dengan tahun 2016, dari 11 (sebelas) indikator kinerja, 6 (enam) diantaranya telah melebihi target tahunan/RPJMD, 3 (tiga) capaiannya sama dengan target dan 2 (dua) lainnya masih dibawah target.

Enam indikator kinerja yang telah melebihi target tersebut adalah:

- Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun dimana rumus yang digunakan adalah semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja, dan untuk tahun 2016 realisasi capaiannya adalah 0,27% dengan persentase nilai 129,63%
- Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif realisasi capaian 73,57% dengan persentase nilai 100,10%.
- Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) realisasi capaian 11,40% dengan persentase nilai 114,04%
- Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB realisasi capaian 87,45% dengan persentase nilai 102,88%
- Terkendalinya/menurunnya angka kelahiran realisasi capaian 9,34 CBR dengan persentase nilai 150%
- Meningkatnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang mengikuti Program KB realisasi capaian 75.78% dengan persentase nilai 103.81%

Tiga indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target adalah:

- Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan 100% dimana untuk 45 Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta telah ditunjuk 1 (satu) orang PPKBD
- Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun 100%.
- Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun 100%. Hal ini sejalan dengan kegiatan pencatatan pelaporan, pendataan keluarga dan upadating data keluarga yang telah dilakukan secara rutin dan berjenjang.

Kemudian dua indikator kinerja yang belum memenuhi target adalah:

- Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% realisasi capaian 86,51% dengan persentase nilai 97,75%.
- Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan dengan capaian 97,78%.

Secara lebih rinci berikut adalah analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja :

1. Terkendalinya/menurunnya angka kelahiran realisasi capaian 9,34 CBR dengan persentase nilai 150%

Crude Birth Rate (CBR) atau angka kelahiran kasar yang menggambarkan banyaknya kelahiran per jumlah penduduk nampak menurun secara konsisten sejak tahun 2012-2016. Pada 2013 CBR Yogyakarta adalah 11,45, kemudian menurun menjadi 10,55 di tahun 2014 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2015 menjadi 9,67 hingga mencapai 9,34 di tahun 2016. Penurunan jumlah kelahiran tersebut menunjukkan tren positif dalam upaya mengendalikan jumlah penduduk melalui pengendalian kelahiran, yang dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu :

- a. Kependudukan, yang meliputi pendidikan kependudukan, perbaikan kualitas data kependudukan, dan advokasi kepada stake holder terkait;
- b. Pendewasaan Usia Perkawinan, yang meliputi PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) dimana termasuk didalamnya adalah penyiapan Generasi Berencana (GenRe) dan Tegar Remaja;
- c. Kesertaan KB, yang meliputi pembinaan kesertaan keluarga berencana, penggunaan alat dan obat kontrasepsi dan atau cara pengaturan kehamilan, peningkatan akses pelayanan keluarga berencana, dan pembinaan kesehatan reproduksi; dan
- d. Pembangunan Keluarga, yang meliputi pembinaan ketahanan keluarga yang bertujuan pada pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Dengan capaian ini, maka tugas Kota Yogyakarta bukan lagi pada upaya meningkatkan angka absolut maupun relatif, tetapi mempertahankan capaian-capaian tersebut dengan terus meningkatkan kualitasnya.

2. Cakupan PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun

Secara keseluruhan indikator kinerja dikatakan telah berhasil. Hal ini terlihat dari capaian dari tahun 2012 – 2016 yang telah melampaui target Renstra, meskipun angka PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun terus mengalami kenaikan setiap tahun. Hal ini tentu saja menjadi catatan tersendiri yang harus mendapat perhatian, sebab semakin tinggi angka pernikahan dini (PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun) maka rentang waktu reproduksi/fertilitas pun akan semakin panjang. Data trend pernikahan dini ini dapat dilihat pada tabel berikut :

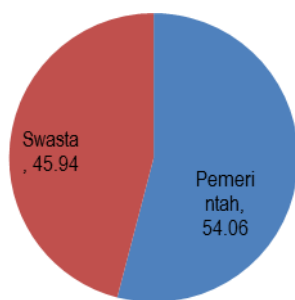
Tren Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

N O	URAIAN	TAHUN								SUMBER
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Dispensasi Nikah (istri berusia kurang dari 16 tahun)				44	47	44	35	37	Kemenag Kota Yogyakarta
2	Persalinan Remaja (di bawah 24 tahun)					186	161	92	85	Dinkes Kota Yogyakarta
3	Tren Pernikahan Dini di Kota usia < 16 tahun	5,17	8,77	5,99	4,57					BPS-Indikator Kesejahteraan Rakyat DIY
4	Tren Pernikahan Dini di Kota usia 17 – 18 tahun	11,3 3	15,7 9	14,3 0	12,3 9					

Dari data diatas, terlihat bahwa pada periode 2009-2012, kecenderungan trend pernikahan dini menurun, sedangkan pada periode 2012-2016 trend pernikahan dini kecenderungannya naik-turun. Kasus pernikahan dini ini, selain berpengaruh pada jangka waktu fertilitas/petumbuhan penduduk, juga berpengaruh pada resiko kematian ibu dan anak dan kesejahteraan keluarga, baik dari segi kemampuan peningkatan ekonomi wanita/keluarga juga dari segi kesiapan kehidupan berumah tangganya.

Untuk itu, penggarapan program Pendewasaan Usia Perkawinan melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan bekerjasama dan advokasi kepada mitra kerja perlu terus dilakukan.

3. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif



Persentase PUS menurut Jaringan Layanan dalam ber-KB

Sumber : statistik rutin, 2016

Secara keseluruhan indikator kinerja ini dinyatakan telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan dalam capaian partisipasi KB aktif ini, selain juga berkat dukungan mitra kerja terkait di wilayah, juga tidak terlepas dari meratanya fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel

persentase PUS menurut Jaringan Layanan dalam ber-KB disamping, dimana perbandingan persentase PUS yang menggunakan fasilitas kesehatan pelayanan KB pemerintah dan swasta hampir merata.

Namun demikian penurunan yang terjadi dari tahun 2015 – 2016 perlu diwaspadai, dimana persentase PUS yang menggunakan Non MKJP masih lebih tinggi dibandingkan PUS yang menggunakan MKJP, sehingga kemungkinan terjadinya *drop out* KB juga lebih tinggi. Selain itu, angka PB yang belum tentu menambah angka PA, juga menjadi kendala tersendiri.

TAHUN	% MKJP	% Non MKJP
2012	39,45	60,55
2013	39,41	60,59
2014	39,69	60,31
2015	40,75	59,25
2016	41,84	58,16
Sumber : statistik rutin bkkbn		

4. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Meskipun target tahunan dan target jangka menengah menunjukkan hasil yang baik, namun hasil ini belum sesuai dengan capaian yang dipersyaratkan Pemerintah Pusat, yaitu sebesar 5%. Unmet need sendiri didefinisikan sebagai kelompok wanita yang sebenarnya sudah tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilannya sampai dengan 24 bulan atau lebih namun tidak menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilannya. Kelompok unmet need merupakan sasaran yang perlu menjadi perhatian dalam pelayanan program KB (Julian, 2009).

Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa unmet need yang tinggi berisiko terhadap peningkatan angka kelahiran. Meski untuk negara-negara maju dan di Kota Yogyakarta, unmet need yang terjadi pada kelompok terdidik tidak selalu berakhir pada kelahiran<sup>1</sup>.

Hal ini terlihat dari data angka kelahiran kasar (CBR), angka fertilitas total (TFR), dan partisipasi KB aktif (PA) di Kota Yogyakarta.

Tahun	Jumlah Kelahiran	CBR	TFR	PA	Unmet Need
2012	4.774	11,16	1,43	73,29	12,09
2013	4.658	11,45	1,47	74,34	10,67
2014	4.369	10,55	1,34	76,30	9,25
2015	3.972	9,70	1,2	75,34	10,38
2016	3.841	9,34		73,57	11,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017  
hasil analisis PSKK UGM, 2017  
dan statistik rutin BKKBN, 2017

Angka kelahiran total atau *Total Fertilitate Rate* adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya, sedangkan angka kelahiran kasar atau Crude Birth Rate/CBR menunjukkan jumlah kelahiran per 1.000 penduduk dalam satu periode tertentu-biasanya satu tahun dengan kriteria : CBR < 20 termasuk kriteria rendah, CBR 20 – 30 termasuk kriteria sedang dan CBR > 30 termasuk kriteria tinggi. Dari definisi dan kriteria tersebut dapat diketahui bahwa Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori fertilitas rendah. Oleh karenanya penting untuk melihat lebih jauh kelompok-kelompok yang terkategori sebagai unmet need ini, baik dari sisi pendidikan maupun umur.

Berdasarkan hasil mini survey yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Alma Ata bekerjasama dengan SKPD KB Kota Yogyakarta pada tahun 2013, ada beberapa penyebab terjadinya unmet need di Kota Yogyakarta :

<sup>1</sup> PSKK UGM, Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta 2018 – 2035 (Yogyakarta : PSKK UGM, 2017), hlm. 25

a. Hubungan Antara Unmet Need KB dengan umur Di Kota Yogyakarta

Dari hasil penelitian ditahun 2013 tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara umur istri dengan kejadian unmet need. Namun penelitian juga menunjukkan bahwa responden yang unmet need pada usia >35 tahun lebih banyak karena rata-rata dari mereka mempunyai alasan merasa sudah bukan masa reproduktif lagi (tua) sehingga kemungkinan untuk terjadi kehamilan kecil.

Hal ini senada dengan penelitian Odumosu et al (2002) dalam Fitriyah (2011) di Negeria, yang menemukan bahwa peluang tertinggi kejadian unmet need KB justru pada kelompok umur yang lebih tua. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tidak ada rumusan umur yang spesifik terhadap kejadian unmet need KB, namun, pada kelompok umur yang lebih tua, semakin berkembang asumsi yang salah mengenai fertilitas, yaitu semakin tua umur seseorang maka akan semakin kecil atau menurun resiko seseorang terhadap kemampuan untuk hamil. Hal yang sedikit berbeda disampaikan dalam dalam penelitian Isa (2009 ) menyatakan bahwa semakin tua umur wanita maka dia akan semakin memiliki pengalaman lebih dalam meggunakan KB sehingga dia bisa memilih alat atau metode KB yang cocok<sup>2</sup>.

b. Hubungan Antara Unmet Need KB dengan Pendidikan Keluarga Berencana (KB) Di Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian PT Alma Ata tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Unmet Need KB pada Pasangan Usia Subur Di Kota Yogyakarta Tahun 2013, menunjukkan sebagian besar istri yang unmet need KB berpendidikan tamat SMA/ perguruan tinggi (PT) yaitu sebanyak 93 orang (63,7%), sedangkan yang berpendidikan tidak tamat/tamat SD yaitu 17 orang (11.64%). Dari responden unmet need KB yang berpendidikan tamat SMA/PT diketahui bahwa alasan tidak menggunakan kontrasepsi modern adalah karena takut efek samping (36,30%), dan alasan lainnya (52,05%) (seperti baru melahirkan, belum ingin melahirkan, menopause dini).

---

<sup>2</sup> ACHEAF, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya *Unmet Need* KB pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Kota Yogyakarta Tahun 2013, (Yogyakarta : ACHEAF, 2013), halm. 65-68



Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Setiadi dan Iswanto bahwa perempuan memiliki peran yang kuat dalam pengambilan keputusan terkait pemakaian alat kontrasepsi. Perempuan dapat memutuskan jenis atau metode alat kontrasepsi yang hendak digunakannya sesuai dengan kondisi kesehatan, sosial ekonominya. Peran tersebut semakin menguat seiring dengan semakin membaiknya pendidikan perempuan. Perempuan terdidik, dalam sejumlah penelitian disebutkan memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem reproduksi, sehingga dapat memutuskan cara-cara yang dianggap efektif untuk mengatur dan mencegah kelahiran<sup>3</sup>.

Walaupun unmet need yang terjadi pada kelompok terdidik di Kota Yogyakarta memang tidak selalu berakhir pada kelahiran, tingginya angka unmet need ini tetap perlu diwaspadai, sebab berdasarkan hasil analisis statistik terhadap sejumlah variabel yang dilakukan oleh PSKK UGM, Sementara indikator yang secara statistik terbukti signifikan terhadap penurunan angka kelahiran adalah PUS yang istrinya istrinya berumur kurang dari 20 tahun dan unmet need, dengan model prediksi

$$\text{TFR} = 0,648 + 0,050 \text{ PUS yang Istrinya Berumur } <20 \text{ tahun} + 0,71 \text{ Unmetneed}$$

Model prediksi tersebut berarti ketika terjadi peningkatan 0,05 persen PUS yang istrinya berumur kurang dari 20 tahun, maka beresiko menambah jumlah kelahiran 0,648, sedangkan ketika terjadi penambahan unmetneed 0,71 persen, maka beresiko menambah jumlah kelahiran 0,648<sup>4</sup>.

##### 5. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Kesertaan ber KB bagi PUS anggota BKB merupakan hal yang penting mengingat bahwa PUS anggota BKB umumnya adalah PUS MUPAR atau pasangan usia subur yang berumur kurang dari 35 tahun atau lebih muda dan mempunyai dua anak atau kurang. (BKKBN, 2009: ii). Dan dengan capaian cakupan anggota BKB ber KB yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan menunjukkan

<sup>3</sup> PSKK UGM, loc. cit

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 30

bahwa pemahaman PUS anggota BKB terhadap program KB cukup baik. Ini tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik melalui pembinaan oleh kader diwilayah, kegiatan peningkatan kapasitas/sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan mitra kerja, semisal kegiatan keterpaduan SDIDTK – BKB – PAUD di POSYANDU (kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan).

Yang perlu menjadi perhatian, selain meningkatkan capaian PUS anggota BKB ber KB, adalah masih rendahnya persentase keluarga sasaran yang menjadi anggota BKB. Dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2015, diketahui baru 44,20% keluarga sasaran yang menjadi anggota BKB. Dengan kata lain, lebih dari 50% keluarga yang memiliki balita belum menjadi anggota BKB. Pembinaan terhadap keluarga sasaran ini yang kemudian menjadi tantangan kedepan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebab persoalan pembinaan keluarga sasaran tidak hanya terjadi di kelompok BKB, namun juga dikelompok Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja.

6. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

Sampai dengan tahun 2016, realisasi indikator sasaran ini belum berhasil memenuhi target RENSTRA maupun SPM. Faktor penyebab tidak tercapainya target indikator sasaran ini antara lain:

- a. Perubahan dalam persyaratan keanggotaan kelompok UPPKS. Pada awalnya kelompok UPPKS merupakan kelompok usaha peningkatan kesejahteraan keluarga yang diperuntukkan bagi akseptor KB (peserta KB) sebagai salah satu usaha untuk kelestarian berKB. Namun persyaratan keanggotaan ini kemudian berubah bahwa siapa pun yang berkeinginan untuk berusaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dapat menjadi anggota kelompok UPPKS;
- b. Sementara itu kegiatan KIE bagi anggota kelompok UPPKS yang terkait dengan ajakan ber-KB mulai berkurang;
- c. PUS (Pasangan Usia Subur) anggota kelompok UPPKS umumnya adalah PUS non potensial untuk dilakukan KIE atau pembinaan

- ajakan ber KB. Hal ini secara tidak langsung terlihat dari hasil Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2015 Kota Yogyakarta dimana jumlah PUS MUPAR (Pasangan Usia Subur Paritas Rendah) yang terdata adalah 1.805 pasangan dari keseluruhan 40.038 PUS. Sementara itu jumlah keluarga yang ikut sebagai anggota kelompok UPPKS adalah 6.877. Dengan demikian probabilitas PUS/keluarga anggota UPPKS sebagai PUS atau PUS MUPAR juga mengikuti perbandingan jumlah PUS dan PUS MUPAR Kota.
- d. Jumlah antara tenaga pembina dan pendamping kelompok UPKKS dan kelompok UPPKS yang ada tidak proporsional. Di Kota Yogyakarta ada 104 kelompok UPPKS sedangkan jumlah Petugas KB (PKB) yang ada diwilayah berjumlah 22 orang.
  - e. Kebijakan dari pemerintah daerah sendiri yang belum sepenuhnya memahami dan mendukung pembinaan terhadap kelompok UPPKS.

Pelestarian dan pembinaan kelompok-kelompok UPPKS ini menjadi penting karena tingkat kesejahteraan masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan program KB dan pembangunan keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa literatur bahwa hubungan antara fertilitas dan tingkat kesejahteraan nampak dari kemampuan keluarga untuk mengakses atau membeli alat kontrasepsi<sup>5</sup>.

Dari beberapa persoalan yang timbul dari pembinaan kelompok UPPKS, maka yang diperlukan adalah adanya refitalisasi pembinaan kelompok UPPKS, kemitraan dengan stake holder terkait dan kebijakan yang mendukung perkembangan kelompok UPPKS.

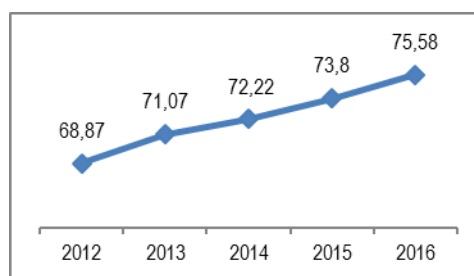
---

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 26

7. Meningkatnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang mengikuti Program KB realisasi capaian 75.78% dengan persentase nilai 103.81%

Tingkat kesejahteraan keluarga berpengaruh terhadap angka kelahiran. Apabila tingkat kesejahteraan keluarga semakin baik, maka kemampuan keluarga untuk mengakses layanan keluarga berencana juga semakin baik. Dalam kondisi ini, keluarga tidak sejahtera ataupun keluarga sejahtera I harus menjadi perhatian pemerintah. Di Kota

Yogyakarta, keluarga pra sejahtera dan sejahtera I yang mengikuti program keluarga berencana terus mengalami peningkatan sejak 2012 hingga 2016. Tahun 2012, jumlah keluarga pra sejahtera



**Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang mengikuti Program KB**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2017

dan sejahteran I yang yang mengikuti program keluarga berencana adalah 68,87 persen. Jumlah tersebut secara konsisten meningkat menjadi 71,07 persen di tahun 2013, kemudian menjadi 72,22 persen di tahun 2014 dan 73,8 persen di tahun 2015 hingga mencapai 75,58 persen di tahun 2016. Peningkatan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I yang mengikuti program keluarga berencana tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan KB, baik dari segi medis maupun kemudahan mendapatkan akses pelayanannya.

8. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan.

Sampai dengan tahun 2015, jumlah PLKB/PKB masih tercukupi dengan ratio 1 petugas di setiap 2 desa/Kelurahan. Namun pada tahun 2016, ratio ini sudah berkurang menjadi 97,78%. Menghadapi kendala sulitnya menambah formasi PLKB/PKB melalui jalur PNS upaya yang dilakukan adalah dengan penguatan Tenaga Teknis Kader KB sebagai pendampingan PLKB/PKB, disamping juga penguatan kelompok-kelompok KB diwilyah.

9. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan. Tahun ini tercapai 100%.

Keberadaan PPKBD sebagai ujung tombak program KB sangat diperlukan, oleh karenanya eksistensinya perlu diperkuat dengan memberikan fasilitas yang memadai, seperti honorarium, orientasi pencaatan dan pelaporan, peningkatan kapasitas, peningkatan wawasan, serta peningkatan komitmen terhadap program KB melalui Temu Kader.

10. Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun.

Meskipun kebutuhan alkon telah terpenuhi di masyarakat, namun perlu tetap diperhatikan dan dipantau mekanisme penyalurannya, terutama di Puskesmas, karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beberapa tahun belakangan ini tidak dapat menyalurkan secara langsung, namun harus melalui UPT Gudang Farmasi. Demikian pula dalam hal peningkatan ketertiban dalam pelaporannya. Dengan adanya aplikasi pencatatan dan pelaporan alat kontrasepsi secara online yang diterapkan BKKBN, maka persediaan alkon dapat terpantau.

11. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100 % setiap tahun.

Pemenuhan informasi data mikro berguna sebagai pijakan dalam perencanaan program KB. Oleh karenanya keberadaannya sangat penting artinya bagi keberhasilan program KB. Tahun 2015 merupakan tahun pertama diberlakukannya Pendataan Keluarga secara serentak, pasca ditetapkannya PP tentang Pendataan Keluarga (PK), dimana pendataan keluarga telah berhasil dilaksanakan dan tercapai 100%, meskipun masih ada beberapa permasalahan berkaitan dengan belum sinkronnya aplikasi PK antara offline dengan online-nya. Kemudian pada tahun 2016, penyempurnaan-penyempurnaan terhadap data hasil PK 2015 terus dilakukan, baik dari sisi aplikasinya maupun dari sisi upadating data dengan membagikan kembali hasil print out PK 2015 kepada kader untuk dilakukan update data.

### C. Capaian Kinerja Anggaran SKPD 2012 – 2016

Gambaran anggaran dan realisasi pendanaan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama tahun 2012 – 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Yogyakarta

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2,104,713,260	4,076,403,750	3,610,131,000	3,823,436,043	4,478,407,193	1,975,222,875	3,643,682,150	3,190,359,200	3,383,898,070	3,756,081,382	93.85	89.38	88.37	88.50	83.87	0.14	0.12

Sebagaimana terlihat dalam tabel 2.2, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dari tahun 2012 – 2016 adalah 0,14% dan 0,12%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran lebih tinggi 0,02% dibandingkan realisasi anggaran.

Jika dilihat rasio realisasi anggaran pertahunnya, maka kecenderungan rasio realisasi anggaran dari tahun 2012 – 2016 terus mengalami penurunan. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 93,85%, kemudian menurun secara berturut-turut pada tahun 2013 dan 2014 menjadi 89,38% dan 88,37%. Pada tahun 2015, rasio realisasi anggaran mengalami kenaikan menjadi 88,50%, namun kembali menurun menjadi 83,87% pada tahun 2016. Naik dan turunnya rasio realisasi anggaran ini pada setiap tahun memiliki penyebab yang berbeda-beda. Jika ditilik/kupas maka secara garis besar penyebab terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi per tahun adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2013

Selisih timbul karena :

- adanya sisa DAK;
- keterlambatan dalam pengumpulan data dari kader ke SKPD yang melebihi batas waktu pengajuan LS sehingga belanja honorarium pengumpul data tidak dapat terserap 100%;
- pada tahun 2013, Kota Yogyakarta memiliki 239 kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang dianggarkan untuk operasional kelompoknya sebanyak 4 frekuensi. Dari 102 kelompok BKB tersebut, tidak semuanya secara aktif mengajukan SPJ operasional kelompok.

2. Tahun 2014

- sisa DAK;
- adanya sharing anggaran dengan Perwakilan BKKBN DIY untuk kegiatan update Pemuktahiran Data Keluarga (MDK) sehingga beberapa belanja yang telah dianggarkan melalui APBD tidak bisa dilaksanakan;
- ketidak sesuaian antara anggaran dengan standarisasi harga barang dan jasa sehingga berpengaruh pada serapan honorarium panitia pelaksana kegiatan keluarga sejahtera;
- pada tahun 2014, jumlah kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Yogyakarta secara total adalah 651



kelompok dengan penganggaran operasional kelompok untuk 6 frekuensi. Jumlah serapan/realisasi anggaran operasional Kelompok BKS dan UPPKS sangat tergantung pada keaktifan kelompok mengajukan SPJ.

3. Tahun 2015

- adanya sharing anggaran dengan Perwakilan BKKBN DIY dan BPPM;
- beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga realisasi tidak mencapai 100%.

4. Tahun 2016

- sisa DAK fisik dan non fisik;
- beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan awal;
- adanya perubahan kebijakan yang berpengaruh pada realisasi anggaran.

Berdasarkan gambaran diatas, secara garis besar ada beberapa hal yang mempengaruhi realisasi anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :

- a. Penyusunan rencana kegiatan, baik dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) maupun dari tatakala waktu pelaksanaannya. Penguatan terhadap KAK dan tatakala kegiatan terutama akan sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, semisal kegiatan-kegiatan operasional kelompok dan kegiatan yang memiliki unsur komunikasi, informasi dan edukasi.
- b. Efisiensi anggaran, yang berasal dari sisa negosiasi pengadaan barang dan jasa, sharing anggaran, dan dari efisiensi pelaksanaan kegiatan.

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada umumnya, permasalahan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta juga merupakan sasaran yang termuat dalam Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan sasaran yang termuat dalam Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat D.I. Yogyakarta.

Sasaran BKKBN dan BPPM adalah sebagai berikut :

- Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
- Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
- Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
- Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi
- Meningkatnya Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan
- Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia

Sedangkan tantangan pelayanan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta untuk mencapai sasaran BKKBN dan BPPM D.I. Yogyakarta secara garis besar adalah :

- Kelestarian ber KB yang terkait dengan capaian penggunaan kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur, tingkat drop out ber KB, dan median usia kawin pertama;
- Peningkatan kualitas kelompok kegiatan yang terkait dengan revitalisasi pembinaan kelompok kegiatan, metode dan sarana untuk melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi); dan
- Penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

Dengan beberapa tantangan pelayanan tersebut diatas, juga ada peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :

- Kerjasama lintas sektor (toga toma dan instansi swasta dan pemerintah) yang sudah berjalan cukup baik yang dikuatkan dengan penandatanganan MOU;
- Memiliki potensi pembinaan kegiatan di wilayah melalui tenaga Petugas Lapangan KB, kader KB dan kelompok kegiatan;
- Beberapa kegiatan yang dilaksanakan mendukung dalam pencapaian kepesertaan KB, antara lain pelayanan KB gratis dan grebeg KB dan reward bagi peserta vasektomi;
- Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas faskes KB melalui dana DAK dan hibah dari BKKBN;
- Pemenuhan alat dan obat kontrasepsi gratis bagi masyarakat miskin.

Dari tantangan dan peluang yang dijabarkan diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta membutuhkan pelayanan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk

Dengan fous pelayanan pada :

- Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk bagi aparatur, remaja dan masyarakat
- Meningkatkan peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)
- Meningkatkan pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi

2. Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Dengan fous pelayanan pada :

- Meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan keluarga berencana (KB)
- Meningkatkan kepesertaan KB
- Meningkatkan pembinaan pendewasaan usia perkawinan
- Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi
- Meningkatkan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, Bina keluarga lansia

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab IV RPJMD Kota Yogyakarta periode tahun 2017 – 2022, disebutkan beberapa permasalahan pembangunan yang ada di Kota Yogyakarta, antara lain adalah kesenjangan ekonomi, kemampuan bersaing pelaku perdagangan kecil masih relatif rendah dibandingkan dengan pelaku perdagangan besar, pengembangan ekonomi kreatif yang belum optimal, perlunya peningkatan potensi pariwisata, pengawasan perizinan investasi belum optimal, masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih rendahnya sarana prasarana pendukung olahraga dan kepemudaan, masalah kesatuan bangsa dan politik, masalah ketertiban dan keamanan, tingginya minat untuk bersekolah di Kota Yogyakarta, upaya peningkatan kualitas kesehatan belum optimal, upaya peningkatan keluarga sejahtera belum optimal, jumlah taman dan rth belum menunjukkan peningkatan, meningkatnya pemanfaatan lahan untuk jasa dan perusahaan, pengelolaan sampah dan limbah belum optimal, kinerja pelayanan air minum/air bersih masih rendah, pencemaran air sungai masih terjadi, permasalahan transportasi perkotaan, belum optimalnya pelayanan terkait kebencanaan, dan masalah tertib administrasi kependudukan dan kepadatan penduduk.

Dari beberapa permasalahan pembangunan tersebut, yang terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta adalah permasalahan upaya peningkatan kualitas kesehatan, khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui program KB dan upaya peningkatan kesehatan reproduksi. Permasalahan lainnya yaitu permasalahan upaya peningkatan keluarga sejahtera dan masalah tertib administrasi kependudukan dan kepadatan penduduk. Upaya peningkatan keluarga sejahtera disini terkait dengan indikator penerapan 8 fungsi keluarga dalam rumah tangga, yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan, yang merupakan salah satu terjemahan dari program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Selanjutnya untuk masalah tertib administrasi kependudukan dan kepadatan penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, menysasar pada persoalan kepadatan penduduknya, dengan salah satu cara yaitu pengendalian kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran. Jika melihat pada persentase migrasi keluar – masuk penduduk Kota Yogyakarta dimana migrasi masuk lebih tinggi dibanding migrasi keluar, (pertumbuhan rata-rata sebesar 34,61 persen per tahun)<sup>1</sup>, menunjukkan bahwa program KB tidak bisa dilihat secara parsial, namun merupakan program yang melayani semua penduduk yang berdomisi di Kota Yogyakarta, terlepas dari status KTP penduduk. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bersama-sama dengan DPMP2A, Dinas PUPKP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UKM Nakertrans, Dinas Perindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kecamatan, juga menjadi SKPD pendukung dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan dengan Dinas Sosial sebagai SKPD utama.

Lebih jelasnya, permasalahan pelayanan yang terdapat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta faktor yang mempengaruhinya dijabarkan dalam tabel berikut ini :

---

<sup>1</sup> RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022

Tabel 3.1

## Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No.	Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
				Internal	Eksternal	
1.	Terkendalnya angka kelahiran (jumlah kelahiran per 1.000 penduduk dalam satu periode tertentu)	9,34 CBR	11 CBR	Validitas data pencatatan dan pelaporan	Contraceptive Prevalence Rate atau angka pravelensi pemakaian kontrasepsi	Fluktuatifnya angka Peserta KB Aktif (PA) dalam 5 tahun terakhir yang cukup signifikan. Penurunan PA sebesar 1,77% pada tahun 2016 (73,57%) dibandingkan dengan jumlah PA pada tahun 2015 (75,34%)
				Kerjasama lintas sektor yang melibatkan kelompok KB, toga toma, fasilitas kesehatan, lembaga kemasyarakatan dan instansi pemerintah dan swasta terkait	Unmetneed	Angka Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih lebih rendah dibandingkan dengan Non MKJP dimana untuk Non MKJP sehingga resiko terjadi DO juga lebih tinggi

No.	Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
				Internal	Eksternal	
					Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kependudukan	<p>Kesadaran suami/pria untuk ber-KB masih rendah (berimplikasi pada masih rendahnya jumlah peserta KB Pria). Kesadaran suami/pria untuk ber-KB ini diperlukan karena tidak semua istri/wanita cocok menggunakan alat/metode KB sehingga bisa dialihkan ke alat/metode KB pria</p> <p>Penambahan jumlah Peserta KB Baru belum signifikan menyumbang kenaikan jumlah PA</p>
						<p>Tingginya angka unmetneed di Kota Yogyakarta (11,40%) dibandingkan dengan target SPM (6%)</p> <p>Ketidakkcocokan data hasil Pendataan Keluarga dengan data dalam statistik rutin</p> <p>Revitalisasi kerjasama dengan fasilitas kesehatan KB swasta, dalam hal tertib administrasi pelaporan (baik laporan pelayanan per bulan dan laporan data basis fasilitas kesehatan) dan bentuk kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang belum bekerjasama dengan BPJS</p> <p>Advokasi dan kerjasama lintas sektoral tentang pentingnya KB dan kependudukan</p>

No.	Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
				Internal	Eksternal	
2.	Pendewasaan usia perkawinan (Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun)	0.27%	0.35%	Sarana dan prasarana pelaksanaan advoksi dan KIE	Advokasi dan KIE terkait program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) melalui Generasi Berencana (GenRe), kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	Masih tingginya angka dispensasi nikah (data kemenag) dan masih tingginya angka kelahiran remaja (Ibu melahirkan dibawah usia 24 tahun).
				Kerjasama lintas sektor yang melibatkan kelompok KB, toga toma, fasilititas kesehatan, lembaga kemasayarakatan dan instansi pemerintah dan swasta terkait	Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kependudukan bagi remaja	Revitalisasi kelompok remaja



No.	Aspek Kajian	Capaian/ kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
				Internal	Eksternal	
3.	Penguatan ketahanan keluarga melalui :					
	Pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);	249	319	Validitas data pencatatan dan pelaporan	Revitalisasi kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK R	Peningkatan kualitas kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR dan BKL), UPPKS dan PIK R
	Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR);	81	116	Sarana dan prasarana pelaksanaan advokasi dan KIE		
	Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL);	107	142	Kerjasama lintas sektor yang melibatkan kelompok KB, toga toma, lembaga kemasayarakatan dan instansi pemerintah dan swasta terkait		
	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);	216	251			
	Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R).	60	95			

Dari tabel 3.1. yang tersaji diatas, dapat disimpulkan ada 3 (tiga) permasalahan pelayanan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, yaitu :

- a. Kelestarian ber KB yang terkait dengan capaian penggunaan kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur, tingkat drop out ber KB, dan median usia kawin pertama;
- b. Peningkatan kualitas kelompok kegiatan yang terkait dengan revitalisasi pembinaan kelompok kegiatan, metode dan sarana untuk melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi); dan
- c. Penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Kota Yogyakarta memiliki Visi “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai” dengan 7 Misi yang mendukung penjabaran Visi tersebut, yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

Misi 2 : Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

Misi 3 : Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

**Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya**

Misi 5 : Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

Misi 6 : Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

Misi 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Dari ke-7 Misi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Kota Yogyakarta mendukung capaian pada Misi 4 “Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya”. Misi ini jika dikaitkan dengan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan faktor penghambat dan pendorongnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	Fluktuatifnya angka Peserta KB Aktif (PA) dalam 5 tahun terakhir yang cukup signifikan. Penurunan PA sebesar 1,77% pada tahun 2016 (73,57%) dibandingkan dengan jumlah PA pada tahun 2015 (75,34%).	Angka Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih lebih rendah dibandingkan dengan Non MKJP sehingga resiko terjadi DO juga lebih tinggi	Memiliki kegiatan pelayanan KB gratis dan grebeg KB
			Penambahan jumlah Peserta KB Baru belum signifikan menyumbang kenaikan jumlah PA	Memiliki MOU dengan fasilitas kesehatan swasta untuk pelayanan KB Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk pelayanan KB yang dilakukan di Puskesmas

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				<p>Kerjasama lintas sektor (toga toma dan instansi terkait) yang sudah berjalan cukup baik</p> <p>Dana DAK yang salah satu menunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan KB di fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah</p>
		<p>Kesadaran suami/pria untuk ber-KB masih rendah (berimplikasi pada masih rendahnya jumlah peserta KB Pria). Kesadaran suami/pria untuk ber-KB ini diperlukan karena tidak semua istri/wanita cocok menggunakan alat/metode KB sehingga bisa dialihkan ke alat/metode KB pria</p>	<p>Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi pria dalam program KB</p>	<p>Memiliki kegiatan pemberian reward bagi peserta KB vasektomi</p> <p>Memiliki kelompok KB Pria untuk mendorong keterlibatan pria/suami dalam program KB</p>

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Penambahan jumlah Peserta KB Baru belum signifikan menyumbang kenaikan jumlah PA	Data PB domisili tidak tercatat dan terlupakan secara rutin	Memiliki aplikasi pencatatan pelayanan kontrasepsi secara online
			Tidak semua PB yang terlayani di Faskes KB berdomisili/tercatat sebagai penduduk Kota	Memiliki MOU dengan faskes KB, termasuk untuk pencatatan dan pelaporannya
		Tingginya angka unmetneed di Kota Yogyakarta (11,40%) dibandingkan dengan target SPM (6%)	Kecenderungan bagi PUS untuk ber-KB non modern karena kekhawatiran akan efek samping	Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi masyarakat miskin secara gratis
				Fasilitas kesehatan KB tersedia dan terjangkau dengan mudah dengan kualitas merata, baik fasilitas kesehatan KB pemerintah maupun swasta
				Dukungan dari Pemerintah Kota dengan menggratiskan pelayanan KB bagi setiap penduduk ber-KTP Kota

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Ketidakcocokan data hasil Pendataan Keluarga dengan data dalam statistik rutin	Validasi data dan tertib pencatatan dan pelaporan	Sudah memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang berjenjang
			SIM KB belum beroperasi dengan sempurna	Memiliki kader dari tingkat RT - RW dan Kelurahan
			Formulir pencatatan dan pelaporan yang masih sering berubah menyesuaikan dengan kebijakan BKKBN	Memiliki kegiatan yang memberikan honorarium bagi kader
			Tidak semua kader pemahaman terhadap tatacara pengisian formulir pencatatan dan pelaporan sama	Memiliki aplikasi pencatatan dan pelaporan ditingkat pusat (BKKBN)
			Format formulir pencatatan dan pelaporan yang terkadang menyulitkan pengisian oleh kader	Memiliki aplikasi pencatatan dan pelaporan ditingkat kota (SIM KB) yang lebih terinci
		Revitalisasi kerjasama dengan fasilitas kesehatan KB swasta, dalam hal tertib administrasi pelaporan (baik laporan pelayanan per bulan dan laporan data basis fasilitas kesehatan) dan bentuk kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang belum bekerjasama dengan BPJS	Belum semua fasilitas kesehatan dapat melaporkan pelayanan kontrasepsi secara tepat waktu	Memiliki MOU dengan faskes KB, termasuk untuk pencatatan dan pelaporannya (bulanan dan tahunan)
			Belum semua petugas pelayanan KB di fasilitas kesehatan, baik medis maupun administrasinya sudah mendapatkan pelatihan dari BKKBN	

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
		Advokasi dan kerjasama lintas sektoral tentang pentingnya KB dan kependudukan	Kerjasama lintas sektor, terutama instansi horizontal, perlu dikuatkan	Jejaring yang terbangun ditingkat wilayah (toga toma) sudah berjalan cukup baik	
			Pengembangan dan perluasan kerjasama yang melibatkan swasta dan lembaga kemasyarakatan		
		Masih tingginya angka dispensasi nikah (data kemenag) dan masih tingginya angka kelahiran remaja (Ibu melahirkan dibawah usia 24 tahun).	Update materi/KIE kurang	Memilik kelompok PIK R, yang berbasis sekolah dan wilayah	
			Inovasi dalam penyampaian KIE		Perhatian stake holder, baik pemerintah maupun swasta, terhadap permasalahan remaja cukup besar
			Revitalisasi kelompok remaja		
			Masih terdapat perbedaan konsep penanganan remaja antara stake holder terkait (perlu penguatan dan pengembangan jejaring kerjasama)		
			Penanganan remaja belum sepenuhnya melibatkan remaja sehingga seringkali kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran		

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Peningkatan kualitas kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR dan BKL) dan UPPKS	Kesadaran masyarakat untuk berkegiatan dimasyarakat semakin berkurang, terutama untuk keluarga yang baik suami maupun istrinya bekerja diluar rumah	Memiliki kader dari tingkat RT - RW dan Kelurahan
			Hambatan dalam kaderisasi muda dan potensial	Memiliki tenaga fungsional Petugas Lapangan KB sebagai perpanjangan tangan pembinaan kegiatan di wilayah
			Jumlah tenaga pembina dan pendamping kelompok BKS dan UPPKS tidak sesuai dengan jumlah sasaran	
			Update materi/KIE kurang	
			Inovasi dalam penyampaian KIE	



### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DIY

Secara keseluruhan, tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan yang menjadi fokus dalam permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta dengan sasaran Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan sasaran Renstra propinsi DIY, khususnya Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3  
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kota Yogyakarta berdasarkan Renstra BKKBN

No.	Sasaran Renstra BKKBN	Permasalahan OPD terkait dengan sasaran Renstra BKKBN	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Terkendalinya angka kelahiran (jumlah kelahiran per 1.000 penduduk dalam satu periode tertentu)	Update materi/KIE kurang	Memilik kelompok PIK R, yang berbasis sekolah dan wilayah
			Inovasi dalam penyampaian KIE	Perhatian stake holder, baik pemerintah maupun swasta, terhadap permasalahan remaja cukup besar
		Revitalisasi kelompok remaja		
		Masih terdapat perbedaan konsep penanganan remaja antara stake holder terkait (perlu penguatan dan pengembangan jejaring kerjasama)		
		Penanganan remaja belum sepenuhnya melibatkan remaja sehingga seringkali kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran		

No.	Sasaran Renstra BKKBN	Permasalahan OPD terkait dengan sasaran Renstra BKKBN	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
2.	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Fluktuatifnya angka Peserta KB Aktif (PA) dalam 5 tahun terakhir yang cukup signifikan. Penurunan PA sebesar 1,77% pada tahun 2016 (73,57%) dibandingkan dengan jumlah PA pada tahun 2015 (75,34%)	Angka Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih lebih rendah dibandingkan dengan Non MKJP sehingga resiko terjadi DO juga lebih tinggi	Memiliki kegiatan pelayanan KB gratis dan grebeg KB
			Penambahan jumlah Peserta KB Baru belum signifikan menyumbang kenaikan jumlah PA	Memiliki MOU dengan fasilitas kesehatan swasta untuk pelayanan KB
				Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk pelayanan KB yang dilakukan di Puskesmas
				Kerjasama lintas sektor (toga toma dan instansi terkait) yang sudah berjalan cukup baik
				Dana DAK yang salah satu menunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan KB di fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah
		Penambahan jumlah Peserta KB Baru belum signifikan menyumbang kenaikan jumlah PA	Data PB domisili tidak tercatat dan dilaporkan secara rutin	Memiliki aplikasi pencatatan pelayanan kontrasepsi secara online

No.	Sasaran Renstra BKKBN	Permasalahan OPD terkait dengan sasaran Renstra BKKBN	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
		Kesadaran suami/pria untuk ber-KB masih rendah (berimplikasi pada masih rendahnya jumlah peserta KB Pria). Kesadaran suami/pria untuk ber-KB ini diperlukan karena tidak semua istri/wanita cocok menggunakan alat/metode KB sehingga bisa dialihkan ke alat/metode KB pria	Tidak semua PB yang terlayani di Faskes KB berdomisili/tercatat sebagai penduduk Kota	Memiliki MOU dengan faskes KB, termasuk untuk pencatatan dan pelaporannya
			Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi pria dalam program KB	Memiliki kegiatan pemberian reward bagi peserta KB vasektomi
				Memiliki kelompok KB Pria untuk mendorong keterlibatan pria/suami dalam program KB
3.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Tingginya angka unmetneed di Kota Yogyakarta (11,40%) dibandingkan dengan target SPM (6%)	Kecenderungan bagi PUS untuk ber-KB non modern karena kekhawatiran akan efek samping	<p>Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi masyarakat miskin secara gratis</p> <p>Fasilitas kesehatan KB tersedia dan terjangkau dengan mudah dengan kualitas merata, baik fasilitas kesehatan KB pemerintah maupun swasta</p>

No.	Sasaran Renstra BKKBN	Permasalahan OPD terkait dengan sasaran Renstra BKKBN	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
				Dukungan dari Pemerintah Kota dengan menggratiskan pelayanan KB bagi setiap penduduk ber-KTP Kota
4.	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih lebih rendah dibandingkan dengan Non MKJP dimana untuk Non MKJP sehingga resiko terjadi DO juga lebih tinggi		Penyediaan alat dan obat kontrasepsi program (gratis) lebih diutamakan pada MKJP
5.	Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	Angka Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih lebih rendah dibandingkan dengan Non MKJP dimana untuk Non MKJP sehingga resiko terjadi DO juga lebih tinggi		Penyediaan alat dan obat kontrasepsi program (gratis) lebih diutamakan pada MKJP

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta berdasarkan Renstra BPPM DIY

No.	Sasaran Renstra BPPM DIY	Permasalahan SKPD terkait dengan sasaran Renstra BPPM DIY	Faktor		
			Pendukung	Penghambat	
1.	Meningkatnya Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Masih tingginya angka dispensasi nikah (data kemenag) dan masih tingginya angka kelahiran remaja (Ibu melahirkan dibawah usia 24 tahun).	Inovasi dalam penyampaian KIE	Perhatian stake holder, baik pemerintah maupun swasta, terhadap permasalahan remaja cukup besar	
			Revitalisasi kelompok remaja		
			Masih terdapat perbedaan konsep penanganan remaja antara stake holder terkait (perlu penguatan dan pengembangan jejaring kerjasama)		
			Penanganan remaja belum sepenuhnya melibatkan remaja sehingga seringkali kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran		

No.	Sasaran Renstra BPPM DIY	Permasalahan SKPD terkait dengan sasaran Renstra BPPM DIY	Faktor	
			Pendukung	Penghambat
2.	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Peningkatan kualitas kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR dan BKL) dan UPPKS	Kesadaran masyarakat untuk berkegiatan dimasyarakat semakin berkurang, terutama untuk keluarga yang baik suami maupun istrinya bekerja diluar rumah	Memiliki kader dari tingkat RT - RW dan Kelurahan
			Hambatan dalam kaderisasi muda dan potensial	
			Jumlah tenaga pembina dan pendamping kelompok BKS dan UPPKS tidak sesuai dengan jumlah sasaran	
			Update materi/KIE kurang	
			Inovasi dalam penyampaian KIE	

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

#### 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.



Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir

jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan

secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

#### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para stakeholders meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan. Tidak mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam,

Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP

diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dokumen KLHS-RPJMD Yogyakarta tahun 2017-2022, memutuskan 5 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, pencemaran lingkungan, pelaksanaan regulasi tata ruang yang belum optimal sarana dan prasarana yang belum memadai, kesenjangan ekonomi dan derajat kesehatan yang belum optimal.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti akan menjadi permasalahan sosial. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi dan menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa 30% lahan dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Berdasarkan perhitungan terbaru dengan merujuk pada regulasi yang ada, bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta masih memerlukan capaian dengan upaya besar.

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang diperkuat dengan adanya instansi yang menangani Tata Ruang dan Pertanahan yang baru saja berdiri, diperlukan waktu untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan keruangan yang optimal. Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan yang memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Dengan adanya lembaga khusus yang tersedia diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan. Sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Permasalahan Kota Yogyakarta sebagai wilayah yang luasnya kecil tidak hanya diselesaikan dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur saja tanpa terintegrasi dengan kabupaten yang berbatasan langsung di sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta muncul sebagai akibat dari interaksi kegiatan antar wilayah satu dengan yang lain, sehingga muncul suatu ketergantungan antar Kota/Kabupaten dalam merencanakan dan mengelola infrastruktur. Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan kerjasama dalam penanganan permasalahan dibidang persampahan, air limbah, drainase, air bersih, jalan, dan transportasi.

Masalah yang dihadapi Kota Yogyakarta saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan DIY yang cenderung meningkat. Selama kurun waktu 2012 – 2016, persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Yogyakarta naik dari 90,62% menjadi 93,30%. Proporsi keluarga miskin dari tahun 2013 – 2014 menurun dari 16,51% menjadi 14,65% namun meningkat bila dibandingkan tahun 2011 dengan persentase 13,11%.

Isu strategis terkait kesehatan masyarakat secara nasional juga diangkat dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, antara lain: peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia, percepatan perbaikan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat. Berkaitan dengan isu strategis nasional tersebut, di Kota Yogyakarta kesehatan ibu menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama Angka Kematian Bayi (AKB) dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun persentase ini masih di bawah angka rerata nasional.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dari hasil analisa indikator kinerja pada 5 tahun sebelumnya dan analisa permasalahan pelayanan Perangkat Daerah serta tinjauan terhadap indikator kinerja BKKBN serta indikator kinerja BPPM DIY yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, diambil Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, sebagai berikut :



Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mengendalikan angka kelahiran melalui edukasi dini pengendalian penduduk, peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kualitas keluarga	Kelahiran penduduk terkendali	rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2	2	2	2	2	2

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta kemudian dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan berikut ini :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai			
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Mengendalikan angka kelahiran melalui edukasi dini pengendalian penduduk, peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kualitas keluarga	Kelahiran penduduk terkendali	Pengendalian penduduk	Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk bagi aparatur, remaja dan masyarakat
			Meningkatkan peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)
			Meningkatkan pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi
		Peningkatan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga	Meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan keluarga berencana (KB)
			Meningkatkan kepesertaan KB
			Meningkatkan pembinaan pendewasaan usia perkawinan
			Meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi
			Meningkatkan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, Bina keluarga lansia

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka disusun rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya untuk tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ini adalah indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 :

Tabel 7.1

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
			Tahun 2017	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Sasaran	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2	2	2	2	2	2	2	2	
2	Program										
	1	Pengendalian Penduduk	CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	11-10 CBR	
	2	Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,66%	73,66%	73,72%	73,77%	73,83%	73,94%	74,00%	74,00%
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11,40%	11,40%	11,34%	11,28%	11,22%	11,16%	11,10%	11,10%
			Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	27,15%	27,15%	28,28%	29,70%	31,12%	32,54%	33,96%	33,96%

## BAB VIII PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa penyusunan “Rencana Strategik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 – 2022” dapat terselesaikan.

Rencana Strategik (Renstra) ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022.

Renstra ini memuat informasi secara transparan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, visi dan misi, capaian program dan kegiatan, serta capaian Pelayanan Perangkat Daerah lima tahun sebelumnya, dimana keberhasilan pencapaian target kinerja dan program kegiatan yang sudah disusun dalam Renstra ini menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Renstra di tahun mendatang.